

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai 'pintu masuk' untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak pada berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Pengelolaan sampah memiliki kaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan (UNEP, 2015). Namun, pengelolaan sampah juga dapat dianggap sebagai 'penghambat sistem'. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat (Sahil, 2016).

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai tujuan terutama pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan (SDGs 12). Konsumsi yang berlebih tentunya akan menghasilkan sampah yang berlebih sehingga mempengaruhi luasan tempat pembuangan sampah yang ada. Tiga persimpangan dari tempat pembuangan terbuka terluas di dunia berada di pantai. Banyak pantai yang dipenuhi oleh buangan bahan dan zat berbahaya serta berbagai macam jenis sampah, seperti sisa jaring ikan plastik, puntung rokok, dan sedotan plastik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi ekosistem yang ada di laut (SDGs 14). Selain ekosistem laut, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi ekosistem darat (SDGs 15). Misalnya saja sampah plastik anorganik yang tidak dapat terurai di tanah sehingga banyak sampah plastik yang menyumbat saluran udara maupun sungai, serta dapat tertelan oleh beberapa hewan.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering pula dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Munculnya isu tersebut dilatar belakangi oleh pandangan bahwa pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus tidak akan menguntungkan bagi siapa saja apabila sistem biologis alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi tidak dicermati dengan baik. Salah satu penyangga sistem biologis tersebut adalah sampah, yang memiliki definisi sebagai barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Asmara & Kurniawan, 2016).

World Commission on Environment and Development (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa menyediakan kebutuhan generasi yang akan datang. Dispesifikan dalam Brundtland Report (WCED, 1987) dalam tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekonomi, maka mempertimbangkan cara untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Kebijakan Pengelolaan sampah, seperti bank sampah dapat dijadikan upaya mengurangi jumlah timbunan sampah yang dimuat ke TPA dan membantu perekonomian masyarakat, yang mana hasil penjualan sampah disimpan dalam bentuk tabungan di bank sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dapat mempengaruhi tercapainya target SDGs, terutama SDGs ke 1, 8 dan 12.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah merupakan salah satu hal yang mengganggu kehidupan masyarakat bila tidak ditangani dengan baik dan terencana. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan barang buangan atau sampah. Volume sampah yang dihasilkan

biasanya sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang/material yang digunakan sehari-hari. Peningkatan volume sampah biasanya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan dipengaruhi pula oleh beberapa faktor seperti meningkatnya intensitas kegiatan sehari-hari, kemajuan teknologi terutama dalam sistem pengemasan produk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung memilih serba cepat dan praktis (Rahmadda et al., 2021).

Masyarakat pendatang atau Urbanisasi menuju suatu wilayah mengakibatkan semakin cepat bertambahnya angka kepadatan penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan yang bertambah juga otomatis berhubungan dengan berkurangnya ketersediaan lahan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Karena mau tidak mau dalam menetapkan tempat TPS dan TPA harus agak jauh dari pemukiman warga atau masyarakat. Syarat yang agak jauh dari pemukiman inilah yang menjadi persoalan sulitnya menentukan tempat yang baik dan layak (Iqbal, 2015).

Proses produksi yang tidak bertanggung jawab akan menghasilkan limbah berbahaya kimia yang dapat meracuni tanah dan sungai di sekitarnya. Hal ini akan mempengaruhi jumlah sumber air bersih yang tersedia (SDGs 6). Selain ekosistem laut dan darat, pengelolaan sampah yang berkelanjutan juga dapat mengurangi polusi udara yang terjadi sehingga akan meningkatkan kehidupan yang lebih sehat (SDGs 3). Misalnya saja masyarakat membuang sampah di tempat terbuka atau bahkan membakarnya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan mengurangi dampak kesehatan dari pembakaran terbuka.

Limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan metana dan CO₂ yang berlebihan. Hal ini tentunya akan berdampak pada perubahan iklim yang ada sehingga pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim (SDGs 13). Sedangkan sampah yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentunya akan memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat (SDGs 8). Sampah yang dapat digunakan kembali serta didaur ulang dapat menjadikan potensi ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat dijadikan alternatif peningkatan perekonomiannya.

Saat ini hampir semua negara berkembang memiliki permasalahan dalam hal sampah. Termasuk Indonesia. Data yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa jumlah timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun dengan mayoritas pengelolaannya ditimbun di TPA. Pengelolaan sampah harus dapat dilakukan dengan sebaik baiknya, untuk menghindari beban bumi yang semakin meningkat dan menyebabkan degradasi (Cerya & Evanita, 2021).

Permasalahan sampah memerlukan *treatment* yang baik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan membahayakan masyarakat. Seperti terjadi pada permukiman di Jalan Deplu Raya, Blok Tanah Ara, Kebayoran Lama. Terjadi kebakaran rumah diduga berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan di lingkungan permukiman. Rumah tinggal yang terbakar memiliki luas sekitar 336 meter persegi (ANTARA, 2025).

Perumahan Dukuh Bima merupakan salah satu Kawasan permukiman di Kabupaten Bekasi, memiliki latar belakang masyarakat yang berbeda beda dan mayoritas masyarakatnya adalah pendatang, maka dapat dikatakan Kawasan permukiman ini merupakan Kawasan tempat tinggalnya masyarakat urban yang memiliki kesibukan diluar rumah dan mayoritas memiliki gaya hidup konsumtif dalam menjalankan kehidupannya. Perumahan Dukuh Bima terletak di Kelurahan Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ini memiliki 5 *cluster* dengan luas *cluster* yang berbeda beda dan jumlah penduduk nya pun berbeda beda dan terdapat fasilitas umum seperti masjid, gereja, sekolah dan juga fasilitas olahraga seperti lapangan voli, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan badminton dan lapangan tenis.

Permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan perumahan Dukuh Bima, khususnya di cluster Bima Citra, menjadi sebuah ironi tersendiri. Jika dilihat secara kasat mata, mayoritas penghuni perumahan ini berasal dari kalangan masyarakat menengah ke atas dengan indikator perekonomian yang tergolong cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi hunian yang tertata rapi, kendaraan pribadi yang dimiliki, serta gaya hidup yang modern.

Selain itu, dari segi pendidikan, masyarakat yang tinggal di kawasan ini juga umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Banyak di antaranya merupakan profesional seperti dokter, pengusaha, pegawai negeri, hingga akademisi. Hemat Penulis masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi biasanya memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap isu-isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Penumpukan sampah rumah tangga di depan rumah masih sering dijumpai, disertai dengan tidak teraturnya jadwal pengambilan sampah oleh petugas. Bahkan, sampah organik seperti dedaunan dan ranting pohon kerap kali berserakan, mengganggu keindahan lingkungan dan berpotensi menyumbat saluran drainase, sehingga menimbulkan genangan air.

Lebih parah lagi, tidak jarang warga berinisiatif untuk membakar sampah organik tersebut. Praktik ini tidak hanya menyebabkan polusi udara, namun juga berisiko menimbulkan kebakaran yang bisa merusak fasilitas publik maupun rumah warga.

Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tingkat pendidikan dan kesadaran lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi masalah penting yang perlu ditelusuri lebih dalam—mengapa masyarakat yang secara sosial-ekonomi dan pendidikan berada pada posisi yang baik, masih belum menunjukkan perilaku pengelolaan sampah yang optimal.

Berdasarkan teori Human Capital, tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kepedulian individu terhadap lingkungan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga membekali individu dengan kemampuan berpikir kritis dalam memahami konsekuensi jangka panjang dari berbagai permasalahan lingkungan. Selain itu, pendidikan juga mendorong munculnya solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekologis (Kim & Go, 2020). Sejalan dengan itu, teori Post-Materialism yang dikembangkan oleh Ronald Inglehart menyatakan bahwa ketika kebutuhan dasar manusia, khususnya dalam aspek ekonomi, telah terpenuhi, maka orientasi nilai individu akan bergeser ke arah hal-hal non-material. Nilai-nilai

tersebut mencakup kepedulian terhadap isu lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang tinggi, seharusnya terdapat kecenderungan yang lebih kuat terhadap perilaku pro-lingkungan dan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup (Peterson & Tollefson, 2024).

Salah satu faktor lain yang patut dicermati adalah pola hidup masyarakat yang cenderung sibuk. Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap masalah ini adalah kesibukan mayoritas warga perumahan yang lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini membuat masyarakat cenderung kurang memiliki cukup waktu atau energi untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada petugas kebersihan karena merasa telah membayar iuran pemeliharaan lingkungan (IPL).

Faktor sosial ini turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Tingkat kesibukan warga yang tinggi menyebabkan keterbatasan waktu untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Hal ini selaras dengan temuan yang dikemukakan oleh Paul Stern dalam teori *Value-Belief-Norm* (VBN), bahwa tindakan pro-lingkungan seringkali tergantung pada persepsi individu mengenai kewajiban moral serta kemudahan akses terhadap tindakan tersebut. Bila warga merasa bahwa sistem sudah ada dan mereka cukup "membayar" untuk layanan, maka motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah menjadi rendah (Stern et al., 1999).

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan: apakah kontribusi IPL yang dibayarkan warga tersebut cukup untuk membiayai operasional tenaga kebersihan secara memadai? Ada indikasi bahwa besarnya IPL yang dikumpulkan tidak proporsional dengan kebutuhan pengelolaan kebersihan yang efektif, sehingga berdampak pada kurang masifnya kinerja petugas kebersihan. Jumlah tenaga kebersihan yang terbatas dan minimnya dukungan fasilitas atau anggaran operasional menjadi hambatan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan secara rutin dan menyeluruh.

Selain itu, ada persoalan struktural terkait kebijakan. Program pengelolaan sampah yang mungkin telah dirancang oleh pemerintah desa kerap kali tidak dapat berjalan dengan baik di lingkungan perumahan karena kebijakan kebersihan dan lingkungan diatur secara independen oleh pihak developer atau pengurus RT/RW setempat. Akibatnya, kebijakan dari desa tidak diratifikasi secara langsung oleh komunitas perumahan, dan muncul tumpang tindih atau bahkan kekosongan koordinasi antara program pemerintah desa dan pengelolaan aktual di lapangan. Ketidaksinkronan ini menyebabkan berbagai inisiatif penanganan sampah yang bersifat top-down dari desa tidak efektif diterapkan, karena tidak adanya kewajiban struktural maupun sosial untuk mematuhi di dalam kompleks perumahan.

Salah satu temuan penting dalam observasi awal penulis adalah penulis menemukan pelaksanaan pemungutan sampah oleh petugas yang dilakukan pada malam hari, sekitar pukul 20.45 WIB. Menurut (Rian Yaitisar Chaniago, 2024) Waktu pengangkutan merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas system pengelolaan sampah; jika tidak dikelola dengan tepat, seperti pemilihan waktu malam hari, dapat menimbulkan gangguan sosial maupun teknis yang berdampak pada efisiensi layanan. Selain itu, keterlambatan pengangkutan berkontribusi pada meningkatnya volume sampah yang menumpuk di lingkungan rumah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Pengelolaan Sampah Pada Perumahan Dukuh Bima Kabupaten Bekasi” dalam rangka mencari informasi bagaimana pula pengelolaan sampah di lingkungan perumahan ini guna dijadikan bahan informasi dan perbaikan bagi masyarakat sekitar.

Permasalahan ini memerlukan penanganan yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga dari aspek kelembagaan, koordinasi antar otoritas, serta keterlibatan masyarakat itu sendiri. Kajian ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk memahami akar persoalan serta merumuskan solusi pengelolaan sampah yang lebih efisien, kolaboratif, dan berkelanjutan di lingkungan perumahan yang secara sosial dan ekonomi seharusnya mampu menjadi teladan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah penyebab terjadinya penumpukan sampah di area Perumahan Dukuh Bima Kabupaten Bekasi?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah di Perumahan Dukuh Bima Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga pada masyarakat di Perumahan Dukuh Bima Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimana pengelolaan sampah di Perumahan Dukuh Bima Kabupaten Bekasi?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang penulis akan membatasi masalah agar pokok masalah lebih terarah pada penelitian ini:

1. Penelitian dilakukan hanya pada masyarakat yang berada di Perumahan Dukuh Bima Kabupaten Bekasi.
2. Pengelolaan sampah yang dianalisis mencakup tahapan: pengumpulan, pemilahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pembuangan akhir.
3. Penelitian ini terbatas pada aspek teknis pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan peran pengelola perumahan/pemerintah daerah.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat dan pengelola sampah setempat, serta dokumentasi dan data sekunder yang relevan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengelolaan sampah serta hambatannya di Perumahan Dukuh Bima Kabupaten Bekasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah serta hambatan yang ada dalam pengelolaan sampah di Perumahan Dukuh Bima Kabupaten Bekasi.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi penulis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan sampah.

b. Bagi institusi

Dapat menjadi referensi tambahan dan masukan bagi lembaga dalam manajemen lingkungan.

c. Bagi pihak ke 3

Dapat memberikan informasi mengenai tentang strategi dan tata kelola sampah pada lingkungan masyarakat.

Intelligentia - Dignitas